

**PENGARUH PENGANGGARAN, REALISASI ANGGARAN DAN
PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi kasus Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)**

SKRIPSI



**NAMA : MEILA
NIM : 222014149**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH PENGANGGARAN, REALISASI ANGGARAN DAN
PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi kasus Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**NAMA : MEILA
NIM : 222014149**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penganggaran, Realisasi Anggaran dan
Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Studi Kasus Organisasi Perangkat
Daerah Kota Palembang)
Nama : Meila
NIM : 222014149
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi sektor publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I



Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., C.A., DR

NIDN/NBM: 0002095507/972321

Pembimbing II



Lis Diuniar, S.E., M.Si

NIDN/NBM: 0220067101/1116716

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi




Hetri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meila

NIM : 22 2014 149

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2019

Yang membuat pernyataan

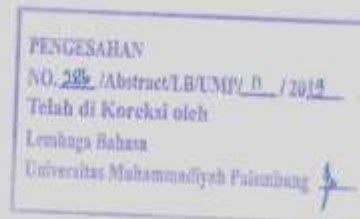

0000
Meila

Abstract

Mella / 222014149 / 2019 / The Influence of budgeting, budget realization and financial reporting toward government agency performance accountability / Public Sector Accounting

This research was formulated whether or not there was a significant influence of budgeting, budget realization and financial reporting toward the performance accountability of government agencies in the city of Palembang. This research was aimed at determining the influence of budgeting, budget realization and financial reporting toward the performance accountability of government agencies in Palembang. The type of the research was an associative research. The location of the research was in the Regional Devices Organization of Palembang city. The variables used were budgeting, budget realization, financial reporting and performance accountability. The data used in this study was primary data. The data collection technique used in this study was through questionnaire. The data analysis technique used was a quantitative and qualitative analysis. The analysis technique used through multiple linear regression analysis in line with F test hypothesis and t test using Statistical Program for Special Science (SPSS). The results showed that budgeting, budget realization and financial reporting were jointly positive and significantly influence toward performance accountability. Partial test results obtained that budgeting was positive and did not significantly influence performance accountability. Budget realization was positive and significantly influenced performance accountability. On the other hand, positive and insignificant financial reporting influenced performance accountability.

Keywords: budgeting, budget realization, financial reporting, performance accountability of government agencies and regional device organizations



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh Penganggaran, Realisasi Anggaran dan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang”. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh hasil bahwa penganggaran, realisasi anggaran dan pelaporan keuangan secara bersama-sama positif dan signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja. Hasil uji secara parsial diperoleh bahwa penganggaran positif dan tidak signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja. Realisasi anggaran positif dan tidak signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja. Sedangkan pelaporan keuangan positif dan signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda (Triyono) dan Ibunda (Nurmala) serta Suamiku (Jamil) yang telah mendidik, membiayai, mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan agar selalu berusaha tanpa kenal putus asa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si.,C.A., dan ibu Lis Djuniar,S.E.,M.Si yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan penulis selama menjalankan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli,S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak BetriSirajuddin,S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si selaku ketua program dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. IbuFentyAsterina S.E.,M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Staf Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Organisasi perangkat daerah dan seluruh responden yang telah membantu dalam pengisian kuesioner.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019
Penulis,

Meila

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PRAKATA | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR GRAFIK | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS | |
| A. Landasan Teori..... | 11 |

| | |
|---|----|
| 1. Penganggaran | 11 |
| 2. Realisasi Anggaran..... | 14 |
| 3. Pelaporan Keuangan..... | 16 |
| 4. Akuntabilitas Kinerja | 19 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 22 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 36 |
| D. Hipotesis..... | 36 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 38 |
| C. Operasional Variabel..... | 39 |
| D. Populasi dan Sampel | 40 |
| E. Data yang Diperlukan..... | 43 |
| F. MetodePengumpulan Data | 43 |
| G. Analisis Data dan Teknik Analisis | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 54 |
| 1. Gambaran Umum Kota Palembang | 54 |
| 2. Uji Instrumen Penelitian | 58 |
| a. UjiValiditas..... | 58 |
| b. UjiReabilitas | 59 |
| 3. Gambaran Profil Responden | 60 |
| 4. Gambaran Jawaban Responden..... | 62 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Uji Asumsi Klasik | 69 |
| a. Uji Normalitas | 69 |
| b. Uji Multikolinearitas | 70 |
| c. Uji Autokorelasi | 71 |
| d. Uji Heteroskedastisitas | 72 |
| 6. Uji Regresi Berganda | 73 |
| 7. Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 75 |
| 8. Uji Hipotesis | 75 |
| a. Uji F | 75 |
| b. Uji t | 76 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian | 77 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Simpulan | 83 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 88 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) prinsip pemerintahan yang baik meliputi : (1) Akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) Keterbukaan dan Transparansi dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) Ketaatan pada hukum dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; (4) Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman evaluasi atas implementasi

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, Karenanya organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih atau dicapai dengan mengefektifkan dan mengefesienkan hasil dari proses organisasi diantaranya penganggaran, realisasi anggaran, dan pelaporan keuangan. (Indra, 2010: 88)

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Mardiasmo (2009:21) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggung jawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua, pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para legislator. (Indra, 2010: 192)

Penganggaran merupakan suatu proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter, proses penganggaran dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. (Mardiasmo, 2009: 61)

Setelah proses penganggaran selesai anggaran itu kemudian direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi sektor publik, dengan kata lain realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. dalam literatur, realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah “operational management”. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien. (Indra, 2010: 231)

Realisasi anggaran mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melaksanakan anggaran. Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan layanan yang harus diberikan kepada publik. Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi. (Indra, 2010: 96)

Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. Tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan. (Indra, 2010: 297)

Terdapat dua jenis pelaporan yang dikenal dalam organisasi sektor publik yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh M.Thoyib dkk (2017) yang mengatakan bahwa penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian Beny (2012), Eko (2013), Siti (2016), Fitrawati (2017), Reyhan (2017) dan Nurul (2017) menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berbeda dengan penelitian Netty (2011) kejelasan sasaran anggaran secara parsial memiliki pengaruh negatif. Mei (2012) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Beny (2012) dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi tidak ada pengaruh pada kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Netty (2011), Reni (2014), Siti (2016), Reyhan (2017) Mei (2012) dan Nurul (2017) Jalaluddin (2017) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun penelitian Eko (2013) menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Beny (2012) dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi tidak ada pengaruh pada sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk mempercepat dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pada praktiknya, LAKIP menggantikan Laporan Tahunan yang harus diterbitkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palembang Tahun 2017 dari 28 indikator sasaran strategis yang diukur capaian kerjanya, 8 OPD tidak sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya :

Tabel.I.1
Pengukuran capaian kinerja
Organisasi perangkat daerah kota palembang
Tahun 2017

| No | OPD | Indikator kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|
| 1. | Dinas koperasi & UKM | Persentase usaha mikro dan kecil yang aktif | 96% | 84,89% | 90,31% |
| | | Rasio UMK yang menjadi usaha menengah | 28% | 15,11% | 53,96% |
| 2. | Dinas perdagangan | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 17% | 8,97% | 52,76% |
| 3. | Dinas tenaga kerja | Angka partisipasi angkatan kerja (per 1000) | 70% | 66,63% | 95,19% |
| 4. | Dinas perikanan | Meningkatnya hasil produksi perikanan | 14,280 ton | 11,751 ton | 82,3% |
| 5. | Dinas lingkungan hidup dan kebersihan | Persentase penanganan sampah | 100% | 74,18% | 74,18% |

Lanjut Tabel.I.1

| | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--------|
| 6. | Badan pengelola pajak daerah | Rasio realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) | 100% | 99,31% | 99,31% |
| 7. | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu | Laju pertumbuhan ekonomi | 8,89% | 6,09% | 68,50% |
| 8. | Dinas perhubungan | Waktu tempuh perjalanan darat per 100 Kilometer | 5,1jam | 6,5Jam | 72,5% |

Sumber: LAKIP 2018

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel.I.2
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

| No | Kategori | Nilai Angka | Interprestasi |
|----|----------|-------------|--|
| 1 | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | >80-90 | Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | >70-80 | Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4 | B | >60-70 | Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |
| 5 | CC | >50-60 | Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |

Lanjut Tabel.I.2

| | | | |
|---|---|--------|--|
| 6 | C | >30-50 | Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| 7 | D | 0-30 | Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. |

Sumber: Permenpan, 2019

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa 8 OPD tersebut memiliki tingkat akuntabilitas kinerja yang berbeda-beda dan tidak konsisten, 2 OPD bahkan hanya mencapai 50-60 berada dalam kategori capaian cukup (memadai), yang artinya perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Data tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja masih lemah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terdapat beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya: 1) Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar, terutama di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 2) Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras; 3) Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas

kinerja; 4) Masih belum tersosialisasikannya keseluruhan instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas; 5) Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta; 6) Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran. www.menpan.go.id

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada OPD dikarenakan kegiatan badan dan dinas secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga merupakan satuan kerja pemerintah yang menyusun, menggunakan, dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah. Berkaitan dengan fenomena di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penganggaran, Realisasi Anggaran dan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penganggaran, realisasi anggaran dan pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penganggaran, realisasi anggaran dan pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penganggaran, realisasi anggaran dan pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk dapat meningkatkan keahlian agar mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik serta rasa bertanggung jawab terhadap masyarakat dan memiliki kesadaran etis yang tinggi.

3. Bagi Almamater

Sebagai referensi bagi lembaga pendidikan akuntansi khususnya atau fakultas ekonomi dan bisnis dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran agar menghasilkan SDM yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Beny Arifin W. 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 13 No. 1, halaman: 15-27, Januari 2012*
- Danang Sunyoto. 2014. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Dina Afrina. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi persepsian pada satuan kerja perangkat daerah kota pekanbaru). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 halaman 1-15*
- Eko Setiawan. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Kabupaten Pelalawan). *Vol. 1 No. 1 Jurnal online.Universitas Riau.hal:1-14*
- Fajri Ismail. 2016. *Statistika*. Palembang: Karya Sukses Mandiri
- Fitrawati, Abdul Kahar dan Muh. Iqbal A. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (survei pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) kabupaten parigi moutong) . *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 hlm 177-184 ISSN: 2302-2019*
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga
- Jalaluddin Muslim A Djalil & Rahmah Maulana. 2017. *Influence of the implementation of the performance-based budgeting on the performance accountability of the regional government institutions* (study at the city government of banda aceh). *Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.8, No.6, page 25-33*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: C.V andi

- Mei Anjarwati. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Semarang: accounting analysis Journal Vol. 1 No. 2 ISSN 2252-6765 Hal 1-36*
- M.Thoyib, indra satriawan, farida husin, mega asmarani, periansya. 2017. *Determination Of Performance Accountability Of Local Government Organizations In Palembang. Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis Volume 3 Number 2. Page 136-146 e-ISSN: 2477-5282*
- Netty Herawaty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36. Mendalo Darat : Jambi.*
- Nurul Fathia. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (study kasus skpd di provinsi riau). *Pekanbaru: Faculty of Economics Riau University, JOM Fekon Vol. 4 No.1. hal : 670-684*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota
- Reyhan Hady Fauzan. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten lima puluh kota provinsi sumatera barat). *Pekanbaru: Faculty of Economics Riau University, JOM Fekon Vol. 4 No. 1hal:1122-1136*
- Siti Ruri Suhaesti. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 halaman 705-719*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Seto Wibisono. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 5 No. 9 ISSN : 2460-0585 hal: 1-22*

V Wiratna Sujarweni. 2015. *Metedologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.